

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan izin Nya jualah maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Adapun kinerja yang diharapkan tercantum dalam Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya mewujudkan good governance.

Banjarmasin, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Banjarmasin

Nuryadi, S.Pd., MA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670413 198804 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	3
1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2) Struktur Organisasi .....	4
3) Sumber Daya Manusia.....	7
4) Sarana dan Prasarana.....	10
C. Permasalahan Utama .....	10
D. Sistematika Penulisan LKj.....	15
BAB II.....	18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin .....	18
2.2 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin .....	19
2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.....	21
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	29
2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir.....	41
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	43
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.....	43
5. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 .....	44
B. Realisasi Anggaran .....	47
BAB IV .....	48
PENUTUP.....	48
Lampiran-Lampiran .....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	7
Tabel 1.2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Pendidik PAUD Negeri dan Swasta.....	8
Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Dasar .....	8
Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Pertama .....	8
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Usia Sekolah dan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan .....	8
Tabel 1.7 Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas .....	9
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja (PK).....	19
Tabel 2.3 Program dan Pagu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.....	27
Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran .....	29
Tabel 3.2 Persentase Capaian Kinerja Sasaran.....	30
Tabel 3.4 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.2 .....	32
Tabel 3.5 Perentasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.3 .....	33
Tabel 3.6 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.1 .....	33
Tabel 3.7 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.2 .....	32
Tabel 3.8 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.3 .....	36
Tabel 3.9 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.4 .....	33
Tabel 3.10 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.3 .....	33
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD Tahun 2020 .....	34
Tabel 3.12 Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 36

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan program prioritas untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, handal, cakap dan kompeten dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Akses pendidikan yang mudah, murah dan terjangkau, serta pendidikan yang berkualitas akan membuat warga masyarakat memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang akan menjadi pendorong serta tumpuan tegaknya pembangunan manusia seutuhnya yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat maju, mapan dan sejahtera yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karenanya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Keyakinan tersebut telah diyakini oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataannya sistem pendidikan Indonesia belum menunjukkan keberhasilan yang baik. Bidang pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas bangsa.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin merupakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :1)Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; 2)Satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 3)Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; 4) Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan5)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Kantor Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang mengemban amanat dan tanggung jawab melaksanakan tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, harus mewujudkan pelaksanaan kinerja dan penerapan mekanisme pertanggung-jawaban dari masing-masing program dan kegiatan yang tepat, jelas dan terukur sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terciptanya good governance. Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyusun

Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin 2021-2026.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

### **1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. Kedudukan**

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **b. Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendidikan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengelolaan Layanan dan Pembinaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan termasuk Pendidikan Luar Sekolah, Peningkatan Mutu Pendidikan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

#### **c. Fungsi**

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

- penyelenggaraan pembinaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sekolah dasar;
  5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sekolah menengah pertama;
  6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  8. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

## **2) Struktur Organisasi**

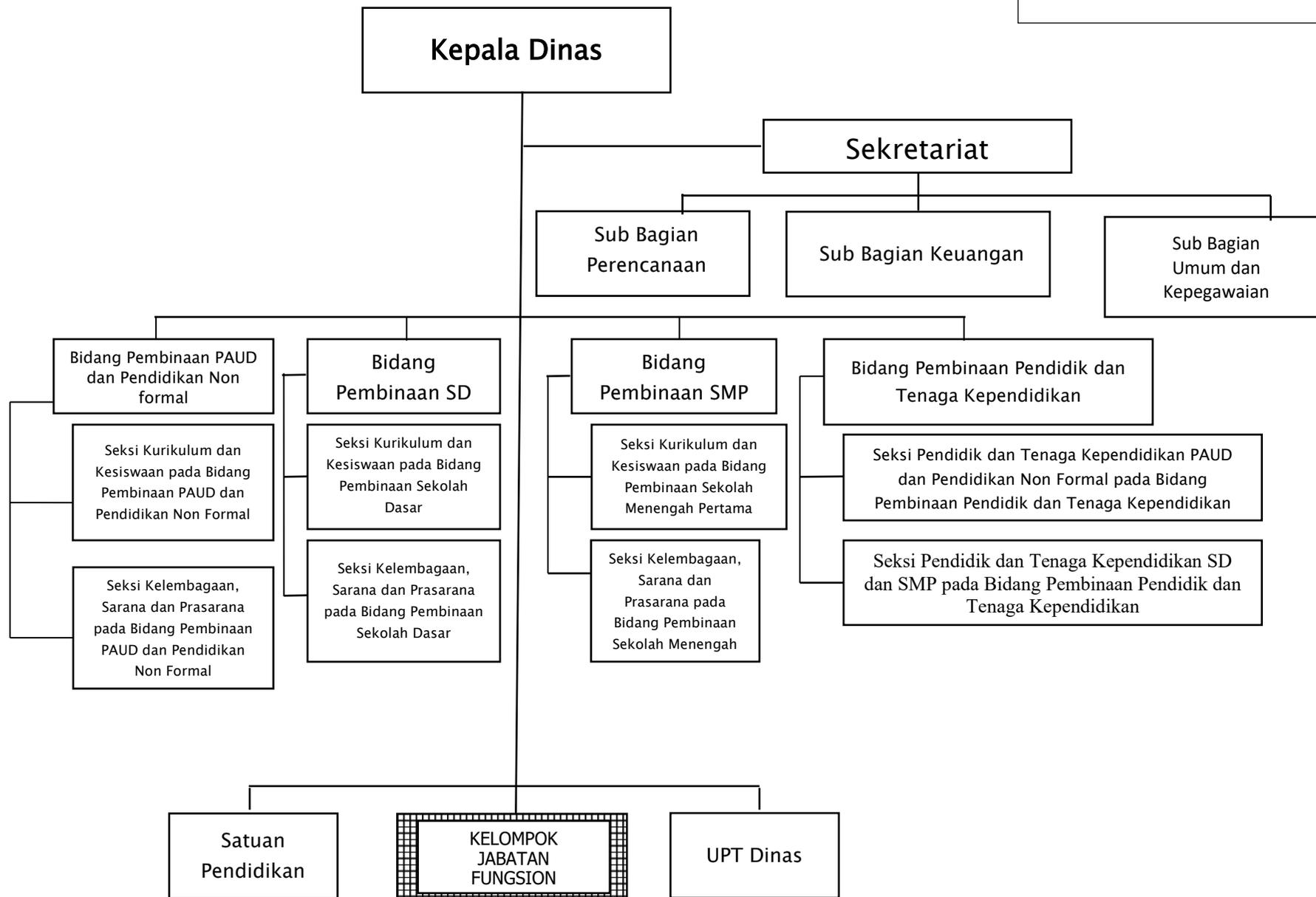
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan, didukung ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan serta sistem prosedur yang baku, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas:

1. Kepala Dinas (Eselon IIb)
2. Sekretaris (Eselon IIIa)
  - a. Sub Bagian Perencanaan (Eselon IVa);
  - b. Sub Bagian Keuangan (Eselon IVa);
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa).
3. Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF (Eselon IIIb)
  - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan (Eselon IVa);
  - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana (Eselon IVa).
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (Eselon IIIb)
  - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan (Eselon IVa);

- b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana (Eselon IVa).
- 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Eselon IIIb)
  - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan (Eselon IVa);
  - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana (Eselon IVa).
- 6. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Eselon IIIb)
  - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Eselon IVa);
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Eselon IVa).
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2021 terdiri :
  - a. UPTD Satuan Pendidikan Formal
  - b. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal
- 8. Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tipe A (Perwali No. 63 Tahun 2022)**





### 3) Sumber Daya Manusia

#### a. Keadaan Pegawai

Jumlah PNS di Dinas Pendidikan kota Banjarmasin (tidak termasuk pengawas dan guru) sampai dengan Bulan Desember 2022 sebanyak 89 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi yang tersebar pada Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNFI, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP dan Bidang PTK. Pegawai tersebut memiliki latar belakang yang dapat klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat. Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat dipaparkan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1.	Golongan IV	10	orang
2.	Golongan III	73	orang
3.	Golongan II	6	orang
4.	Golongan I	-	orang
Jumlah		89	orang

Sumber: Dinas Pendidikan

Tabel 1.2  
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	S 3	-	orang
2	Strata 2	7	orang
3	Strata 1	45	orang
4	D 2	1	orang
5	Sarjana Muda / D III	15	orang
	SMA	21	orang
	Jumlah Total	89	orang

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebanyak 6071 orang.

Tabel 1.3  
Jumlah Pendidik PAUD Negeri dan Swasta

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	11	224	235
2	Banjarmasin Selatan	1	284	285
3	Banjarmasin Tengah	10	251	261
4	Banjarmasin Timur	13	284	297
5	Banjarmasin Utara	6	309	315
	Total	41	1352	1393

Sumber data: <https://datadik.kemdikbud.go.id/>

Tabel 1.4  
Jumlah Tenaga Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	494	99	593
2	Banjarmasin Selatan	618	228	846
3	Banjarmasin Tengah	391	207	598
4	Banjarmasin Timur	534	39	573

5	Banjarmasin Utara	511	127	638
Total		2548	700	3248

Sumber data: <https://datadik.kemdikbud.go.id/>

Tabel 1.5

Jumlah Tenaga Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	177	63	240
2	Banjarmasin Selatan	199	58	
3	Banjarmasin Tengah	256	118	82
	Banjarmasin Timur	239	10	56
	Banjarmasin Utara	274	36	78
Total		1145	285	324

Sumber data: <https://datadik.kemdikbud.go.id/>

#### b. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa

Tabel 1.6

Jumlah Penduduk Usia Sekolah dan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan

Penduduk Usia Sekolah		Keadaan Siswa	
Usia	Jumlah	Satuan Pendidikan	Jumlah
5-6 Tahun	22.257	PAUD usia 5-6 Tahun	15.586
7-12 Tahun	71.883	SD+MI+Paket A	64.847
13-15 Tahun	36.120	SMP+MTs+Paket B	29.145

Sumber data penduduk: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Semester 1 Tahun 2022

Sumber data siswa: <https://datadik.kemdikbud.go.id/>

#### 4) Sarana dan Prasarana

Jumlah Sekolah, Rombongan Belajar dan Ruang Kelas

Tabel 1.7  
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang / Berat
PAUD	499	971	1.128	769	293	66
SD+SDS	257	2.251	2.258	1.298	530	440
SMP+SMPS	64	746	878	553	176	149

Sumber data: <https://datadik.kemdikbud.go.id/>

### C. Permasalahan Utama

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Oleh karenanya, analisis masalah lingkungan internal dan eksternal sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai organisasi juga menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karenanya diperlukan analisis masalah lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

#### a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran tentang kelemahan sebagai masalah internal dan kekuatan sebagai potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota

Banjarmasin yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Lingkup analisis berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam upaya untuk mencapai Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 10,30 Tahun pada tahun 2022, Pemerintah Kota Banjarmasin telah membuat kebijakan. Kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin pada urusan pendidikan meliputi: a) Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan, b) Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang, dan c) Peningkatan tata kelola pembangunan Pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan ketiga kebijakan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

## **1. Kelemahan**

### **a) Kelemahan pada Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan**

- 1) Belum semua penduduk usia sekolah menikmati layanan pendidikan yang berkualitas,
- 2) Belum semua satuan pendidikan memenuhi standar kualitas layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3) Belum semua guru memenuhi kualifikasi S1.
- 4) Belum semua satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka.

### **b) Kelemahan pada Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar**

- 1) Belum semua satuan pendidikan memenuhi standar kualitas sarana prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 2) Masih terjadi disparitas akses layanan antara sekolah antar wilayah di Kota Banjarmasin, terutama perbedaan akses layanan sekolah antara sekolah di wilayah kota dengan di wilayah pinggiran. Hal ini menunjukkan belum meratanya

kualitas layanan antara wilayah satu dengan wilayah lain di Kota Banjarmasin. Dampak dari belum meratanya layanan sekolah antar wilayah adalah:

- ✓ terjadi konsentrasi atau tumpukan warga Kota Banjarmasin ke beberapa sekolah tertentu yang mudah akses layanannya.
- ✓ kemacetan lalu lintas karena masyarakat dari berbagai wilayah menuju ke sekolah pada wilayah yang sama.
- ✓ kesulitan pemerintah daerah mengatur distribusi tenaga pendidik secara merata karena jumlah tenaga pendidik yang terbatas.

Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah pemerataan akses layanan sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menetapkan system zonasi saat melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta melakukan pengangkatan PPPK didukung dengan pemetaan dan pendistribusian pendidik.

- 3) Belum semua satuan Pendidikan yang menerapkan akses layanan informasi berbasis teknologi sebagai usaha pemerataan akses dalam pelayanan.

**c) Peningkatan tata kelola pembangunan Pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan**

- 1) Belum semua guru menikmati tunjangan sertifikasi.
- 2) Rendahnya kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anakm Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbudristek No 9 Tahun 2022. Faktor-faktor penyebab masalah ini antara lain:
  - ✓ Rendahnya kemampuan sumber daya dalam melakukan evaluasi system Pendidikan dalam bentuk analisis data satuan Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan

yang dapat digunakan sebagai penyusunan strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas dalam penganggaran Pendidikan.

- ✓ rendahnya kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan sistem pengelolaan data dan informasi mutu pendidikan yang lengkap, akurat, terkini serta cepat dan mudah diakses.
- ✓ rendahnya kemampuan kepala sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis data dan informasi mutu pendidikan sesuai dengan SPM dan SNP.
- ✓ rendahnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini.
- ✓ rendahnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan program dan kegiatan.

### **c. Analisis Lingkungan Eksternal :**

#### 1) Sosial

Ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial. Dengan berkembangnya media sosial berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentu mempengaruhi cara kerja, berperilaku dan bersosial. Jika tidak dapat mengikuti perkembangan, maka kemampuan pengelolaan yang efisiensi dan efektifitas akan semakin tertinggal. Dengan demikian harus menjadi agenda penting untuk mengikuti perubahan sosial dalam pemikiran pendidikan nasional. Dan juga masih kurangnya pendidikan orang tua dalam pengasuhan anak (*parenting education*).

## 2) Ekonomi

Dalam rangka mencapai prestasi belajar anak sudah barang tentu harus ditunjang oleh berbagai sarana dan media belajar terutama dalam rumah tangga. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan belajar anak harus ditunjang oleh kecukupan dan kemantapan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga termasuk salah satu faktor keberhasilan dan kegagalan pendidikan bagi anak.

## 3) Budaya

Era digital telah memasuki semua lini kehidupan setiap orang. Dengan *Hand Phone (HP)*, dunia yang luas ini ada dalam genggaman tangan. Semua budaya dari seluruh penjuru dunia dapat mempengaruhi setiap budaya masyarakat lain termasuk masyarakat Indonesia. Perubahan budaya tidak dapat dielakkan. Salah satu budaya yang paling sederhana, dapat dilihat pada permasalahan perasaan malu. Jika dulu perasaan malu dominan dalam kehidupan masyarakat, namun kini perasaan tersebut semakin menipis dan menguap, sehingga melicinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang semula di pandang kurang bahkan tidak pantas. Di antara pengaruh dunia Barat yang tertanam pada bangsa kita, khususnya anak usia sekolah.

## 4) Globalisasi

Arus globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, informasi dan telekomunikasi telah mempengaruhi konsentrasi belajar peserta didik dan masih tersita waktu belajar pada saat di rumah yang seharusnya mengulangi pelajaran di sekolah. Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan kecenderungan umum dalam bidang pendidikan.

## **D. Sistematika Penulisan LKj**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2022 adalah:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Disajikan gambaran singkat mengenai : Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja. Isi yang dipaparkan mencakup sasaran yang ingin diraih SKPD dalam tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

#### **A. Rencana Strategis**

Uraian singkat tentang Rencana Strategis, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program SKPD

#### **B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja**

Berisi mengenai ada atau tidaknya perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, serta indikator keberhasilan pencapaiannya, termasuk indikator Kinerja Utama masing-masing SKPD dan Indikator Kinerja tiap-tiap Program/kegiatan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas keuangan dipaparkan pada akhir bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian sasaran SKPD.

1. Alasan anggaran dan realisasi belanja

Berisi alokasi anggaran dan realisasi belanja, serta alasan yang menjelaskan mengapa jumlah realisasi belanja sesuai/tidak dengan alokasi anggaran.

2. Efisiensi sumber daya

Berisi perhitungan efisiensi anggaran program dan kegiatan, serta alasan yang menjelaskan mengapa terjadi efisiensi/tidak efisiensi.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berisi jumlah sisa lebih perhitungan anggaran yang dikembalikan ke kas daerah, alasan terjadinya sisa, serta kemungkinan penggunaan sisa tersebut.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran Lampiran**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

### 2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dalam rangka menunjang akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarmasin, sebelum menetapkan Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terlebih dahulu dikembangkan Visi Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu **”Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat”**

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Banjarmasin memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, yaitu ***Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia***. Misi tersebut selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

#### 2.1.1 Prinsip Layanan Dinas Pendidikan

##### **IQRA**

##### **I: INTEGRITY (Integritas)**

Insan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mampu berperilaku kerja yang memegang teguh secara utuh akan prinsip kejujuran, kewibawaan, adab dan bertindak benar serta selalu konsisten dalam mempertahankannya.

##### **Q: QUALITY (Kualitas)**

Insan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin lebih mengutamakan kualitas atau mutu kerja terbaik dalam setiap layanan publik yang diberikan.

##### **R: RESPONSIBILITY (Bertanggung Jawab)**

Insan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan amanah dan penuh rasa tanggung jawab bekerja dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang diembankan kepadanya.

#### **A: ACCOUNTABILITY (Akuntabilitas)**

Insan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya SKPD yang baik dan terpercaya.

### **2.2 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjarmasin telah direvisi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 sebagai acuan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan kinerja tahunan;
- c. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Evaluasi kinerja
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2022:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA
1	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	1. Harapan Lama Sekolah 1
		1. Presentasi Guru Bersertifikat 2 Pendidik
		1. Rasio Guru Terhadap Murid 3 Rasio Sekolah Terhadap Murid
		1. 4
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mi 1
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 2
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi 3
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 4
		2. Angka Rata-rata Lama Sekolah 5
		2. Akreditasi Sekolah Minimal B: 6 SD/Mi SMP/MTs
3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	3. Nilai LHE AKIP 1

### 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dokumen Perjanjian kinerja lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dengan mengacu pada rencana strategis periode 2021-2026 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2022. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2022.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	1.1 Presentasi Guru bersertifikat pendidik	85,00	%
		1.2 Rasio Guru terhadap Murid jenjang PAUD	8,85	%
		1.3 Rasio Guru terhadap Murid jenjang SD	15,80	%
		1.4 Rasio Guru terhadap Murid jenjang SMP	14,10	%
		1.5 Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang PAUD	40,50	%
		1.6 Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang SD	217,95	%
		1.7 Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang SMP	301,00	%
		1.8 Harapan Lama Sekolah	14,79	Tahun
2		2.1 Angka Partisipasi Kasar		
		- PAUD	80,00	%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
	Meningkatnya Aksebilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan dasar	- SD/MI	100,00	%
		- SMP/MTs	88,00	%
		2.2 Angka Partisipasi Murni		
		- PAUD	68.00	%
		- SD/MI	100.00	
		- SMP/MTs	80,00	%
		2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah	10.30	Tahun
		2.4 Persentasi Pencapaian Akreditasi B Sekolah		
		- SD	62,00	%
		- SMP	89,00	%
2.5 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	100,00	%		
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah bidang Pendidikan	3.1 Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	BB	nilai

Untuk mewujudkan agenda kerja pemerintah daerah, maka perlu dituangkan dalam suatu wadah yang lebih mempertegas agenda tersebut yakni dalam bentuk program dan kegiatan. Program Pemerintah Kota Banjarmasin pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi serta penjabaran dari tugas pokok dan fungsi seluruh satuan kerja dalam menyukseskan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Adapun program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2022 ditinjau berdasarkan bidang pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

### Urusan Wajib Bidang Pendidikan

#### 1. Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tujuan : Mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Sasaran : Tercapainya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
- b. Perangkat Daerah  
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**2. Program : PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing

Sasaran : Tercapainya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan dasar

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

**3. Program : PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing

Sasaran : Tercapainya peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

**4. Program : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing

Sasaran : Tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

**5. Program : PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing

Sasaran : Tercapainya layanan perizinan pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Misi kedua seperti sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Banjarmasin yaitu “*Meningkatkan derajat kesehatan dan Pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia*” dengan pagu anggaran sebesar **Rp 478.954.082.401** dengan 9 Program Kegiatan. Pagu Anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan yaitu yang bersumber dari APBN sebesar **Rp219.174.836.000** dan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp259.779.246.401** adapun rinciannya bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Program dan Pagu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

NO	PROGRAM	NILAI DPA (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	330.181.755.384

2	Program Pengelolaan Pendidikan	147.738.453.217
3	Program Pengembangan Kurikulum	442.547.900
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	353.016.000
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	238.309.900
<b>Jumlah</b>		<b>478.954.082.401</b>

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

---

---

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2022 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. IKU spesifik dan jelas (*Spesific*)
- b. IKU dapat diukur secara objektif (*Measurabel*)
- c. IKU dapat dicapai (*Achievabel*)
- d. IKU menggambarkan hasil (*Relevance*)
- e. IKU untuk kurun waktu tertentu (*Time Bound*)

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa Dinas Pendidikan atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan

secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2022, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian di analisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tahun anggaran 2022. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Nilai Capaian
I	$x > 85\%$	Sangat berhasil
II	$70\% \leq x \leq 85\%$	Berhasil
III	$55\% \leq x \leq 70\%$	Cukup Berhasil
IV	$x \leq 55\%$	Kurang Berhasil

Tabel 3.2 Persentase Capaian Kinerja Sasaran

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA UTAMA		REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022				Capaian
					TARGET		REALISASI		
1		2		3	4		5		6
1.	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	1.1	Presentasi Guru bersertifikat pendidik	36,78	85,00	%	59,58	%	70,09%
		1.2	Rasio Guru terhadap Murid jenjang PAUD	10,68	8,85	%	12,00	%	135,00%
		1.3	Rasio Guru terhadap Murid jenjang SD	17,14	15,80	%	16,14	%	102,15%
		1.4	Rasio Guru terhadap Murid jenjang SMP	15,51	14,10	%	15,65	%	110,99%
		1.5	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang PAUD	29,72	40,50	%	35,00	%	86,42%
		1.6	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang SD	204,39	217,95	%	204,38	%	93,77%
		1.7	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang SMP	361,42	301,00	%	350,13	%	116,32%
		1.8	Harapan Lama Sekolah	13,94	14,8	Tahun	13,95	Tahun	94,26%
2.	Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan yang bermutu di Kota Banjarmasin	2.1	Angka Partisipasi Kasar						
			- PAUD	38,43	80,00	%	39,10	%	48,88%
			- SD/MI	99,83	100,00	%	101,65	%	101,65%
			- SMP/MTs	87,08	88,00	%	80,27	%	91,22%
		2.2	Angka Partisipasi Murni						
			- PAUD	34,06	68,00	%	37,10	%	54,56%
			- SD/MI	98,52	100,00	%	99,06	%	99,06%
			- SMP/MTs	79,71	80,00	%	79,75	%	99,69%
		2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,20	10,30	Tahun	10,21	Tahun	99,13%
			2.4	Persentase Pencapaian Akreditasi B Sekolah					
		- SD	90,63	62	%	93,39	%	150,63%	
		- SMP	97,00	89,00	%	98,31	%	110,46%	

		2.5	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	87,00	100,00	%	74,20	%	74,20%
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas pendidikan	3.1	Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	BB	BB	nilai	BB	nilai	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>									<b>98,76%</b>

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja:

#### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah **98,76 persen**, maka berdasarkan kategorisasi pencapaian kinerja dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "Sangat Berhasil". Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

#### 1) Presentase Guru bersertifikat pendidik

Tabel 3.3 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	36,78	85,00	%	59,58	%	70,09%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>70,09%</b>

Dari data di atas bahwa di Kota Banjarmasin jumlah guru yang bersertifikat pendidik mencapai target sebesar 70,09% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

## 2) Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang PAUD

Tabel 3.4 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.2	Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang PAUD	10,68	8,85	%	12,00	%	135,00%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>135,00%</b>

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin satu orang guru mengajar 12 orang murid jenjang PAUD. Berdasarkan Permendikbud no 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rasio ideal Guru Terhadap Murid Jenjang PAUD dengan anak didik berusia 4-6 Tahun, yakni untuk jenjang Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK), Rasio guru dan anak maksimal 1:15. Artinya, satu orang guru KB ataupun TK sebaiknya tidak melayani lebih dari 15 orang anak didik. Realisasi ini telah melebihi target sebesar 135,00% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah guru PAUD di kota Banjarmasin sebanyak 1.283 orang berbanding dengan jumlah peserta didik jenjang PAUD yang dilayani di Kota Banjarmasin sebanyak 15.399 peserta didik.

### 3) Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD

Tabel 3.5 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.3

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target	Realisasi		% Capaian	
1.3	Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD	17,14	15,80	%	16,14	%	102,15%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>102,15%</b>

Sumber: <https://dss.datadik.kemdikbud.go.id/dss/>

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin satu orang guru mengajar 16 orang murid jenjang SD. Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah standar Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD maka jumlah maksimum adalah 28 peserta didik. Realisasi ini telah melebihi target sebesar 102,15% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

### 4) Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SMP

Tabel 3.6 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.4

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target	Realisasi		% Capaian	
1.4	Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SMP	15,51	14,10	%	15,65	%	110,99%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>110,99%</b>

Sumber: <https://dss.datadik.kemdikbud.go.id/dss/>

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin satu orang guru mengajar 15 orang murid jenjang SMP. Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah standar Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SMP maka jumlah maksimum adalah 32 peserta didik. Realisasi ini telah melebihi target sebesar 110,99% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

5) Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang PAUD

Tabel 3.7 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.5

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.5	Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang PAUD	29,72	40,50	%	35,00	%	86,42%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>110,99%</b>

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin bahwa rasio sekolah terhadap murid jenjang PAUD, yaitu jumlah sekolah pada tahun 2022 sebanyak 442 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 15.339 peserta didik. Sehingga rasio sekolah terhadap murid jenjang PAUD mencapai target sebesar 86,42% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah sekolah PAUD di kota Banjarmasin sebanyak 442 sekolah yang berbanding dengan jumlah peserta didik jenjang PAUD yang dilayani di Kota Banjarmasin sebanyak 15.399 peserta didik.

6) Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang SD

Tabel 3.8 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.6

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.6	Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang SD	204,39	217,95	%	204,38	%	93,77%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>93,77%</b>

Sumber: <https://dss.datadik.kemdikbud.go.id/dss/>

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin bahwa rasio sekolah terhadap murid jenjang SD yaitu data yang diperoleh dari aplikasi dapodik tahun 2022, dengan rasio jumlah sekolah jenjang SD sebanyak

257 sekolah berbanding jumlah siswa sebanyak 52.527 peserta didik. Sehingga mencapai target sebesar 93,77 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

7) Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang SMP

Tabel 3.9 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.7

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target		Realisasi		% Capaian
1.7	Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang SMP	361,42	301,00	%	350,13	%	116,32%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>116,32%</b>

Sumber: <https://dss.datadik.kemdikbud.go.id/dss/>

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin bahwa rasio sekolah terhadap murid jenjang SMP yaitu data yang diperoleh dari aplikasi dapodik tahun 2022, dengan rasio jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 64 sekolah berbanding jumlah siswa sebanyak 22.408 peserta didik. Sehingga mencapai target sebesar 116,32% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

8) Harapan Lama Sekolah

Tabel 3.10 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.8

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target		Realisasi		% Capaian
1.8	Harapan Lama Sekolah	13,94	14,8	Tahun	13.95	Tahun	94,26%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>94,26%</b>

<https://www.bps.go.id/indikator/26/417/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah.html>

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas adalah dengan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat dan membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 20 PKBM yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

#### 9) Angka Partisipasi Kasar

Tabel 3.11 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target		Realisasi		% Capaian
2.1	Angka Partisipasi Kasar						
	- PAUD	38,43	80,00	%	39,10	%	48,88%
	- SD/MI	99,83	100,00	%	101,65	%	101,65%
	- SMP/MTs	87,08	88,00	%	80,27	%	91,22%
	<b>Rata-rata capaian</b>						<b>92,27 %</b>

<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang

pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan pada tabel diatas, rata-rata capaian angka partisipasi kasar adalah 48,88% untuk APK PAUD atau realisasi sebesar 39,10% dari target sebesar 80%, APK SD dari target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 101,65%, untuk capaian APK SMP sebesar 80,27% dari yang telah ditarget sebesar 88,00% pada target Perjanjian Kinerja (PK). Capaian perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 tidak mencapai 100% diantaranya dikarenakan adanya kenaikan target dan dibarengi dengan menurunnya jumlah siswa SD dari tahun sebelumnya, namun terjadi kenaikan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APK SMP juga mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya kenaikan target dan dibarengi dengan menurunnya jumlah siswa SMP dari tahun sebelumnya, namun terjadi kenaikan jumlah penduduk usia 13-15 tahun, mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%, dikarenakan populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD yang seharusnya masih bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menaikkan angka partisipasi Kasar (APK) didasarkan pada penambahan ruang kelas, penambahan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan setiap peserta didik mendapat

fasilitas sesuai dengan SPM. Proses penerimaan siswa baru juga dilaksanakan dengan sistem *online* sehingga kualitas peserta didik baru dapat dipertahankan dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. Akan tetapi pada jenjang pendidikan SMP masih terdapat APK yang rendah untuk lingkup kecamatan dimana belum meratanya jumlah SMP pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

10) Angka partisipasi murni (APM)

Tabel 3.12 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target		Realisasi		% Capaian
2.2	Angka Partisipasi Murni						
	- PAUD	34,06	68,00	%	37,10	%	54,56%
	- SD/MI	98,52	100,00	%	99,06	%	99,06%
	- SMP/MTs	79,71	80,00	%	79,75	%	99,69%
	Rata-rata capaian						<b>84,44 %</b>

<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>

Angka Partisipasi Murni untuk usia sekolah adalah jenjang pendidikan tertentu sesuai usia sekolah pada jenjang tersebut. Apabila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tentunya tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Jika dilihat dari tabel 3.12 diatas maka realisasi capaian pada setiap jenjang pendidikan SD untuk tahun 2022 belum memenuhi target akhir Perjanjian Kinerja APM tingkat SD yaitu 100,00% sedangkan realisasi APM tingkat SD



yaitu 99,06%, meningkat dari capaian tahun sebelumnya, hal ini disebabkan jumlah siswa pada usia sekolah pada jenjang tersebut meningkat dari tahun sebelumnya selaras dengan jumlah penduduknya pada

jenjang usia tersebut yang cenderung meningkat. Selanjutnya APM untuk jenjang SMP/MTs realisasinya 79,75% dengan hasil capaian sebesar 99,69%, capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 80,00%, hal tersebut juga dikarenakan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tersebut memang terlihat menurun dari tahun sebelumnya namun terjadi penambahan penduduk pada usia tersebut. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus berupaya untuk meningkatkan APM dengan menerapkan program dan kegiatan yang tepat di tingkat PAUD, SD/SMP Negeri dan Swasta, melakukan pembangunan Sekolah baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat sekolah dan ruang kelas, pembenahan manajemen sekolah dengan sistem MBS (manajemen berbasis sekolah) serta menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh sekolah tingkat dasar (SD/SMP).

#### 11) Angka rata – rata lama sekolah

Tabel 3.13 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.3

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target	Realisasi	% Capaian		
2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,20	10,30	Tahun	10,21	Tahun	99,13%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>99,13%</b>

<https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal pada suatu daerah, tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan



jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dilihat pada tabel diatas capaian kinerja sebesar 99,13 persen, akan tetapi realisasi angka rata-rata lama sekolah sebesar 10,21 tahun sehingga belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Jika dilihat angka rata-rata lama sekolah tersebut maka di kota Banjarmasin rata-rata orang bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 SMA.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target antara lain:

- a. Masih ada siswa putus sekolah di Banjarmasin.
- b. Masih terdapat siswa usia sekolah yang tidak bersekolah.
- c. Tingkat pendidikan penduduk yang masuk ke Banjarmasin dari luar daerah masih rendah.
- d. Kesulitan pendataan siswa yang bersekolah di pesantren karena tidak terintegrasi dengan Aplikasi Dapodik maupun EMIS dari Kemenag.
- e. Karena adanya regulasi yang tidak memasukkan santri-santri sebagai siswa usia sekolah, dimana pesantren tidak menggunakan kurikulum nasional khususnya pesantren salafiyah.

Usaha yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pelayanan minimal bidang Pendidikan melalui beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Peningkatan aksesibilitas, melalui: pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), mengurangi angka putus sekolah, pendirian SMP Terbuka, Perubahan status PAUD swasta menjadi negeri serta mengefektifkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar

(SKB) dalam menjangkau anak tidak sekolah dan anak putus sekolah untuk mendapat pendidikan kesetaraan melalui kegiatan Paket A, B, dan C.

- b. Peningkatan mutu pembelajaran, karena dengan mutu pembelajaran yang baik siswa akan termotivasi kuat untuk meneruskan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.
- c. Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk dapat melaksanakan pendidikan secara lebih baik dan profesional, termasuk dalam memahami kurikulum dan menerapkannya di kelas secara lebih baik.

#### 5) Persentasi Pencapaian Akreditasi B

Tabel 3.14 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 42 Indikator 2.4

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022				
			Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian		
3.1	Persentasi Pencapaian Akreditasi B						
	- SD	90,63	62,00	%	93,39	%	150,63%
	- SMP	97,00	89,00	%	98,31	%	110,46%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>130,55%</b>

<https://datadik.kemdikbud.go.id/>

Dari target yang ditetapkan di perjanjian kinerja untuk pencapaian sekolah berakreditasi B untuk SD yang di targetkan 62% dari jumlah seluruh sekolah dasar yang ada di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 terealisasi 93,39% dari target yang ditetapkan untuk Sekolah Dasar yang sudah mencapai nilai akreditasi B, sedangkan untuk sekolah menengah pertama yang di targetkan 89,00% pada tahun 2022 dari jumlah sekolah menengah pertama yang ada di Kota Banjarmasin, realisasi nya mencapai 98,31% sekolah yang sudah mendapatkan akreditasi dan ini melebihi dari target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target antara lain:

- a. Ambang batas nilai untuk mencapai nilai B lebih mudah dijangkau oleh satuan pendidikan.
- b. Pihak sekolah sudah siap dalam mengikuti proses akreditasi oleh tim BASN.
- c. Pola pendampingan yang baik dari pihak yang terlibat dalam proses akreditasi, baik pengawas, assesor, dinas pendidikan maupun lembaga akreditasi (BASN).
- d. Banyaknya sumber referensi terkait proses akreditasi, hingga memudahkan sekolah dalam mempelajari dan mempersiapkan diri menjelang proses akreditasi.

## 2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian Dinas Pendidikan tahun 2021 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja		Realisasi					Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	1.1	Presentasi Guru bersertifikat pendidik	48,63%	80,05%	100%	36,78%	59,58%	62,00%	100,06%	125%		70,09%
	1.2	Rasio Guru terhadap Murid jenjang PAUD	-	-	-	10,68	12,00	-	-	-		135%
	1.3	Rasio Guru terhadap Murid jenjang SD	-	-	-	17,14	16,14	-	-	-		102,115 %
	1.4	Rasio Guru terhadap Murid jenjang SMP	-	-	-	15,51	15,65	-	-	-		110,99%
	1.5	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang PAUD	-	-	-	29,72	35,00	-	-	-		86,425
	1.6	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang SD	-	-	-	204,39	204,38	-	-	-		93,77%
	1.7	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang SMP	-	-	-	361,42	350,13	-	-	-		116,32%
	1.8	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,91	13,92	13,93	13,94	13,95	98,08%	95,47%	94,19%		94,26%
2	2.1	Angka Partisipasi Kasar										
		- PAUD	43,46%	65,36%	83,93%	38,43%	39,10%	57,53%	65,43%	83,93%		48,88%
		- SD/MI	103,04%	95,39%	93,49%	99,83%	101,65%	82,90%	76,59%	100,94%		101,65%
		- SMP/MTs	101,03%	86,71%	81,48%	87,08%	80,27%	95,03%	81,47%	88,38%		91,22%
	2.2	Angka Partisipasi Murni										
		- PAUD	41,57%	63,26%	68,71%	34,06%	37,10%	55,13%	63,32%	68,16%		54,56%
		- SD/MI	93,39%	88,68%	71,61%	98,52%	99,06%	83%	78,65%	63,37%		99,06%
		- SMP/MTs	78,02%	71,41%	75,69%	79,71%	79,75%	78,59%	71,81%	75,91%		99,69%
2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,93	9,84	9,95	10,20	10,30	93,71%	90,53%	82,92%		99,13%	

	2.4	Persentasi Pencapaian Akreditasi B Sekolah										
		- SD/MI	-	-	-	90,63%	93,39%	-	-	-		150,63%
		- SMP/MTs	-	-	-	97%	98,31%	-	-	-		110,46%
	2.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	-	-	-	87%	74,20%	-	-	-	87%	74,20%
3	3.1	Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	-	-	-	BB	BB	-	-	-	100%	100%

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD Tahun 2022

INDIKTOR KINERJA UTAMA		TARGET RPJMD 2022		REALISASI PK 2022	
1.1	Harapan Lama Sekolah	13,94-13,96	Tahun	13,95	Tahun
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,97-9,98	Tahun	10,30	Tahun

### 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia Global, hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil. Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

## **5. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2022**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Segala upaya penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah perlu ditunjang dengan program dan kegiatan yang diharapkan menambah dan memperkuat pencapaian target program kegiatan. Tata kelola administrasi perkantoran juga sangatlah penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Untuk tercapainya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja SKPD dalam hal ini pada Dinas Pendidikan, maka diperlukanlah kegiatan-kegiatan penunjang diantaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **2. Program Pengelolaan Pendidikan**

Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikan menengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah, Peran Pemerintah adalah salah satu kunci keberhasilan dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan terutama di daerah masing-masing.

Demikian juga halnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk

memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif perlu diagendakan pada periode pembangunan pendidikan ke depan.

### **3. Program Pengembangan Kurikulum**

Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru antara lain dihasilkan oleh penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu menjadi kunci dalam menjamin kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara itu, peningkatan mutu layanan pendidikan oleh LPTK bertujuan untuk melakukan reformasi LPTK secara menyeluruh dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan, melibatkan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru, penjaminan mutu calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system, memaksimalkan pelaksanaan program induksi dan mentoring guru, mengembangkan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual serta melaksanakan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama. Selain menindaklanjuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah pusat, daerah juga ditantang untuk dapat membuat kurikulum

pendukung yang bersifat kedaerahan/kearifan lokal tanpa terlepas dari koridor pembuatan kurikulum yang seharusnya. Kurikulum ini dinamakan kurikulum muatan lokal.

#### **4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

Peran penting pendidik (Guru) dan tenaga kependidikan (PTK) dalam satuan pendidikan tidak bisa disepelekan. Namun yang tidak kalah penting selain kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah bagaimana ketersediaan dan pendistribusian untuk pemerataan PTK di satuan-satuan pendidikan. Keterpenuhan akan PTK masih menjadi pekerjaan rumah bagi daerah, terutama untuk memenuhi standar sesuai yang seharusnya.

Untuk itulah diperlukan upaya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan guna menunjang tata kelola Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan di daerah. Di samping itu yang tidak kalah penting adalah pemberian layanan bagi PTK terkait peningkatan kompetensi dan kesejahteraan mereka (Sertifikasi).

#### **5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan di daerah perlu didukung oleh pemerintah. Namun masyarakat yang ingin mendirikan sekolah tetap perlu mengikuti aturan yang berlaku. Untuk itulah dinas pendidikan perlu berupaya memberikan pengendalian dan perizinan pendidikan.

Adapun beberapa tujuan dari adanya program seperti ini adalah agar dapat memudahkan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan serta agar terpeliharanya serta meningkatnya mutu sebuah satuan pendidikan agar tercapat tujuan pendidikan. Disamping itu agar satuan pendidikan juga terlindungi dari penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban dan yang paling

penting adalah melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah peserta didik yang mengenyam pendidikan di lembaga tersebut.

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2022 untuk Belanja Langsung adalah sebesar **Rp488.780.827.404** dimana angka serapannya sebesar **Rp466.855.493.969,52** dengan silpa sebesar **Rp21.925.333.434,48**, secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2022 mencapai 95,51 persen untuk keuangan, **ada kenaikan** sebesar 7,71% dari tahun 2021 (87,80) hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu

- Ada upaya Efisiensi anggaran/sisa lelang dan juga anggaran untuk
- Adanya kegiatan-kegiatan yang gagal dilaksanakan karena berbenturan dengan aturan di atasnya seperti TPP ASN PPPK
- Di awal tahun, Pembelajaran masih dilaksanakan di rumah dengan metode Daring dan tatap muka terbatas walau di tahun ajaran baru sudah mulai pembelajaran tatap muka penuh.
- Untuk lebih detail serapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini:

Tabel 3.17 Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM	NILAI DPA	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp321.110.474.967	Rp308.965.612.735	96,22
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp166.661.145.637	Rp157.260.453.234	94,36
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp442.340.900	Rp152.152.000	34,40
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp353.016.000	Rp334.626.000	94,79
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp213.849.900	Rp142.650.000	66,71
<b>Jumlah</b>		<b>Rp488.780.827.404</b>	<b>Rp466.855.493.969</b>	<b>95,51</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

---

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) didunia pendidikan. LKj Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2022 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari 5 (lima) program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2022 adalah sebesar 98,76% Dari sebanyak 14 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2022 adalah sebesar 95,51%. Dari sebanyak 5 program Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sebanyak 3 program dengan capaian kinerja keuangannya sangat berhasil, 1 program dengan capaian kinerja keuangannya cukup berhasil, dan 1 program dengan capaian kinerja keuangannya kurang berhasil.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain pengimplementasian kurikulum merdeka, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan assisment nasional (AN) yang lebih berkualitas, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyebaran guru yang belum merata. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian

dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan dapat mendukung misi dari kepala daerah yakni ***Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.***

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 95,51 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp488.780.827.404**. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, untuk rata-rata capaian Kinerja Sasaran pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2022 bisa dikatakan berhasil yaitu sebesar 98,76% sedangkan efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya. Banjarmasin sudah sangat berhasil dan efisien dengan realisasi anggaran sebesar 95,51%.

Pada masa yang akan datang diharapkan perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan semakin matang dengan segala indikator yang lebih smart.

## **Lampiran-Lampiran**

---



**2022**

**LKj**

**DINAS PENDIDIKAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023**